



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA STAF KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2022-2023

Masa Persidangan Rapat ke- : V --

Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka

Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 30 Mei 2023

Waktu Rapat : Pukul 14.23-16.42 WIB

Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ketua Rapat : DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua Kom II/F-PG)

Acara Rapat : 1. Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN T.A 2024;
2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
4. Dan Lain- lain.

Sekretaris Rapat : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)

Hadir : 23 dari 48 orang Anggota dengan rincian:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN:

1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
(Ketua/F-PG)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. H. Heru Sudjatmoko
3. Paryono
4. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
5. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. Drs. H. Riswan Tony DK.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
3. Prasetyo Hadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. H. Haruna, M.A., M.B.A.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Mohammad Muraz, M.M.
2. Rezka Oktoberia
3. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

0 orang Anggota dari 4 Anggota:

-

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Khairul Muhtar, SE., M.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

-

ANGGOTA YANG IZIN:

1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. (F-PDIP)
2. Riyanta (F-PDIP)
3. Ir. Hugua (F-PDIP)
4. Teddy Setiadi, S.I.Kom. (F-PKS)

B. LEMBAGA NEGARA:

1. Kementerian Sekretaris Negara RI (Drs. Setya Utama, M.Si.);
2. Sekretaris Kabinet RI (Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.);
3. Deputi Perwakilan Kepala Staf Kepresidenan RI (Jaleswari Pramodhawardani); dan
4. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI (Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

Agar kita bisa cepat mulai, dan karena Pimpinan dan Anggota DPR baru *break*. Mungkin ada yang sholat, ada yang ke toilet, terus macam-macam. Jadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI, maka supaya kita biar cepat ini kita skors dulu satu kali sepuluh menit.

Setelah itu berapapun yang hadir kita lanjutkan, maka rapat ini kita, saya skors.

(RAPAT DISKORS)

Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Kabinet beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Menteri Sekretaris Negara atau yang mewakili,
Kemudian yang terhormat Saudara Kepala Staf Kepresidenan atau yang mewakili, beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Kepala BPIP beserta seluruh jajaran dan,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama, tentu kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhanu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara konstitusional di bidang anggaran pada hari ini dalam keadaan *sehat wal afiat*.

Tadi, kita sudah melalui mekanisme pencapaian kuorum, maka saya menyatakan bahwa rapat ini sudah memenuhi kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), peraturan tata tertib DPR RI. Dan perkenankanlah saya membuka rapat ini, dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.23 WIB)

Selanjutnya kami mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Kabinet, juga terima kasih kepada Saudara Menteri Sekretaris Negara atau yang mewakili, juga terima kasih kepada Saudara KSP atau yang mewakili, dan juga BPIP atas kesediaannya pada hari ini memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI.

Bapak/Ibu sekalian,

Hari-hari ini adalah buat Komisi II DPR RI, dan kita semua hari-hari yang menyenangkan masuk siklus anggaran. Menyenangkan karena tidak perlu berpikir panjang mendiskusikannya.

Kita bicara tentang angka-angka yang pasti akan segitu-begitu saja. Jadi tidak perlu me- me-apa namanya, mengeluarkan energi untuk berdebat begitu panjang. Oleh karena itu, sesuai dengan surat edaran yang disampaikan oleh Badan Anggaran, DPR RI menugaskan kepada komisi-komisi untuk melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengar pendapat dengan mitranya masing-masing untuk membahas RKA/KL dan RKK RKP/KL tahun 2024. Dan nanti tentu hasilnya akan disampaikan kembali kepada DPR RI.

Nah, saya sekaligus menawarkan agenda dan persetujuan. Nah, yang jawab cuma Pak Andi Saja ini. Jawab sendiri Pak ya?

Bahwa rapat kita hari ini mengagendakan penjelasan tentang:

- o Pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2024;
- o Rencana kerja tahun 2024; dan
- o Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan 2023.

Kita bisa setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Dan karena kita tidak perlu membahas terlalu panjang, karena ini semua penyampaian saja. Nanti ada waktu sesi berikutnya, minggu depan itu akan dilakukan pendalaman biasanya.

Jadi, saya sering juga sampaikan. Saya ulangi lagi kalau teman-teman nanti ada yang hadir. Jadi, kita hanya mendengarkan penjelasan, apalagi Pak Sekretaris Kabinet hanya punya waktu sampai 15.30 WIB ya, paling lama. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu 15.30.

Jadi, kita sepakati dulu. Mudah-mudahan bisa kita selesai sampai 15.30 WIB.

Setuju Pak Andi?

F-PG (Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, M.B.A.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Nah, oleh karena itu, nanti saya persilakan kepada masing-masing, supaya juga memperhatikan waktu di dalam menyampaikan penjelasan.

Untuk yang pertama, tentu kami persilakan kepada Saudara Sekretaris Kabinet untuk menyampaikan penjelasan tentang pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2024.

Silakan Pak.

SEKRETARIS KABINET RI (Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati Ketua Komisi II DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia, Kemudian juga anggota yang hadir, Bapak/Ibu dari Kementerian Sekretaris Negara, BPIP, KSP,

Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Mensesneg, Bapak Ketua. Beliau tidak bisa hadir karena sekarang ini sedang mendampingi Presiden bersama dengan OJK, sedangkan Bapak Jenderal Moeldoko sedang kunker ke Sulawesi Selatan. Untuk itu Beliau berdua tidak bisa hadir dan kami secara kolektif kolegial akan menyampaikan secara ringkas apa yang ingin disampaikan.

Yang pertama, mengenai anggaran Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022, Pagu Sekretariat Kabinet sebesar Rp305.755.794.000,00. Realisasi untuk pagi untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp295.639.314.880,00 atau lebih tepatnya 96,69% dari anggaran yang telah kami sebutkan tadi.

Untuk itu kami ingin menyampaikan secara lebih lengkap, lebih detail realisasi anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2022 per jenis belanja.

- Belanja pegawai sebesar 98,72%
- Belanja barang 93,63%, dan kemudian
- Belanja modal 93,45%.

Sehingga rata-rata untuk tahun anggaran 2022, 96,69%.

Bapak Ketua yang kami hormati dan Anggota yang terhormat,

Sekretariat Kabinet hampir 10 tahun berturut-turut kita selalu mendapatkan WTP dan selalu mendapatkan peringkat yang cukup baik, karena kontribusi dan pengawasan yang selalu diberikan dengan baik oleh Bapak Ketua dan juga Anggota Komisi II DPR RI.

Dalam 10 tahun itu ternyata tidak terasa, saya 8 tahun memimpin berturut-turut mendapatkan WTP. Karena anggarannya kecil, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk itu.

Dan kita termasuk yang secara dari tahun ke tahun mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan, termasuk salah satu yang secara rutin selalu mendapatkan.

Tetapi untuk tahun yang lalu, karena covid, kita tidak bisa secara maksimal untuk belanja barang, sehingga kita mendapatkan nomor tiga (3). Tetapi biasanya antara nomor satu (1), nomor dua (2), dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi inilah bagian dari penghargaan yang selalu kami terima.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan juga Anggota yang terhormat,

Untuk Sekretariat Kabinet tahun pagu anggaran 2023, 2023 sebesar Rp352.292.228.000,00. Kemudian dilakukan *ultimuly adjustment*, dan kemudian diberlakukan koreksi lagi. Akhirnya anggarannya menjadi Rp334.692.394.000,00.

Dalam kesempatan ini, Pak Ketua, para Anggota yang terhormat, kami ingin melaporkan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 22 Mei.

Program untuk dukungan manajemen kami telah, sampai dengan 22 Mei telah mengeluarkan sekitar 50,83% dari anggaran yang ada. Untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 15,13%, sehingga *average* sampai dengan tanggal 22 Mei 45,60%. Kami meyakini bahwa performa ini pasti tidak terlalu berbeda dengan tahun anggaran 2022.

Realisasi anggaran Sekretariat Kabinet untuk per jenis belanja adalah sebagai berikut.

- Belanja pegawai 45,75%;
- Belanja barang 41,15%;
- Belanja modal 91,72%.

Karena memang belanja modalnya kecil sekali. Sehingga dengan demikian *average*-nya adalah 45,60%.

Untuk pagu indikatif Sekretariat Kabinet pada tahun 2024. Bapak Ketua, kami mohon dukungan dari Bapak Ketua dan juga Anggota yang kami hormati. Kami mengajukan, dan sudah sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Rp348.769.306.000,00. Mudah-mudahan ini tidak terlalu banyak *adjustment* lagi.

Tetapi sebelum menyampaikan *adjustment*, kami telah menyampaikan tambahan anggaran Sekretariat Kabinet untuk utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan, karena ini yang baru. Dan kebetulan kalau ada teman-teman PPP kalau tidak mendukung, keterlaluhan. Karena Ketua Umumnya ini yang memegang sekarang. Jadi pasti saya yakin teman-teman PPP akan memberikan dukungan untuk itu.

Demikian.

Bapak Ketua, Anggota yang kami hormati,

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Sekretaris Kabinet.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Menteri Sekretaris Negara, Pak Sesmen.

SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Yang kami hormati Ketua Komisi II, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung,
Yang kami hormati para Wakil Ketua Anggota Komisi II dan Anggota
Komisi II,
Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kabinet,
Yang kami hormati para Staf atau yang mewakili,
Yang kami hormati Ketua BPIP,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Walaupun bulan syawal telah berlalu, perkenankanlah kami menyampaikan mohon maaf lahir bathin Bapak Ketua dan Bapak/Ibu sekalian. Semoga kita semua senantiasa memperoleh limpahan rahmat dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

Dan yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Mensesneg yang pada hari ini tidak dapat menghadiri undangan, karena sedang mendampingi Bapak, mendampingi Bapak Presiden.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Menindaklanjuti surat yang kami terima, kami akan menyampaikan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024, rencana kerja pemerintah tahun 2024, dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022.

Yang pertama, kami ingin mengawali dengan target PNBP, penerimaan negara di tahun 2002, 2022 ditetapkan sebesar 404 miliar 436 juta lebih. Yang terdiri dari:

1. PNBP PPK DPK 192 miliar 21 juta lebih, kemudian
2. BLU PPK Kemayoran 260 miliar, 209 miliar 537 juta lebih, dan
3. PNBP Kementerian Sekretariat Negara 2 miliar 177 juta lebih.

Dan rencananya terdapat revisi, sehingga PNBP Kementerian Sekretariat Negara menjadi dua miliar dua juta, Rp2.295.000.000,00 lebih.

Dari target-target PNBP tersebut yang berjumlah 404 miliar, kemudian setelah penyesuaian, per-tanggal 31 Desember penerimaan PNBP mencapai 446 miliar atau sebesar 110,36% atau melebihi target yang telah kami tetapkan.

Selanjutnya terhadap anggaran belanja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-909-MK-II 2021 tanggal 4 Oktober. Pagu alokasi anggaran belanja negara semula ditetapkan Rp1.897.446.000.000,00 lebih, yang terdiri dari dan mengalami penyesuaian.

Yang pertama adalah penambahan anggaran sebesar Rp59.581.000.000,00 lebih, yang terdiri dari:

- BLU PPK DPK sebesar Rp31.610.000.000,00 lebih yang akan kami alokasikan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pemeliharaan kawasan dan *venue*, dan FIFA World Cup tahun 2023, dan
- BLU PPK Kemayoran sebesar Rp27.970.000.000,00 lebih yang kami alokasikan untuk pemenuhan kebutuhan operasional layanan kawasan, dan rehabilitasi sistem penanganan jalan umum di taman, di kawasan Kemayoran.

Yang kedua, penambahan anggaran dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp1.693.000.000.000,00 lebih yang dialokasikan untuk kesiapan persiapan dan penyelenggaraan standar pengamanan, perlindungan Kepala Negara, pemerintahan pimpinan internasional pada KTT G20. Dukungan kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, Satuan Tugas Undang-Undang Cipta Kerja dan tim transisi pendukung kesiapan pembangunan dan pemilihan BKN.

Yang ketiga, penambahan anggaran dari PNBP Rp66 miliar yang disetujui Kementerian Sekretaris Negara.

Yang keempat, merujuk arahan Kementerian Keuangan telah dilakukan 2 (dua) kali pencadangan anggaran atau *automatic adjustment* melalui pemblokiran DIPA tahun anggaran 2002, 2022 sebesar Rp154.021.000.000,00 lebih. Sehingga anggaran yang diblokir sebesar.

Kemudian telah diangkat, disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pembukaan blokir sebesar Rp135 miliar lebih, sehingga anggaran yang diblokir seluruhnya adalah sebesar Rp18.973.000.000,00 lebih. Setelah beberapa penyesuaian tersebut, maka pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.631.000.000.000,00 lebih. Pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp1.285.000.000.000,00 lebih, dan
2. Program penyelenggaraan layanan pada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp2.345.000.000.000,00 lebih.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 31 Desember 2022, pagu anggaran belanja tahun anggaran 2022 telah terealisasi sebesar Rp3.419.000.000.000,00 lebih atau 94,16%. Realisasi tersebut sudah termasuk realisasi belanja kedua BLU. Namun apabila tidak termasuk kedua BLU, maka realisasi adalah sebesar 94,31%.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran dan kinerja pada tahun 2022, Kementerian Sekretariat Negara telah mendapatkan beberapa apresiasi, antara lain:

- Kinerja pelaksanaan anggaran dengan skors 91,92 dengan kategori baik dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan skors 80,56 dan predikat WTP dari BPK.

Selanjutnya.

- Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 Kementerian Sekretariat Negara beserta penyesuaiannya dapat kami laporkan sebagai berikut:
 1. Bahwa target PNBK Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2023 ditetapkan 436 miliar lebih, terdiri dari PPKGBK 217 miliar lebih, kemudian Kemayoran 216 miliar lebih.
 2. Kemudian dari target-target PNBK hingga tanggal 22 Mei berhasil dicapai sebesar Rp176. Jadi sampai dengan saat ini telah dicapai 40,48% dari apa yang telah kita targetkan.

Kemudian untuk pagu alokasi anggaran tahun 2023, yang semula ditetapkan sebesar Rp2.609.000.000.000,00 lebih mengalami penyesuaian sebesar Rp594.000.000.000,00 dengan perincian penambahan alokasi sebesar Rp104.000.000.000,00 dari saldo kas BLU PPKGBK dan PPKK. Kemudian dari penambahan dari Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan sebesar Rp489.000.000.000,00 untuk beberapa keperluan, antara lain untuk KTT ASEAN, dan lain-lain.

Dengan perincian tersebut, maka anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023 menjadi sebesar Rp3.204.436.000.000,00 lebih, yang terdiri dari:

- Rp1.431.000.000.000,00 berupa program dukungan manajemen; dan
- Yang kedua, program penyesuaian penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp1.773.000.000.000,00 lebih.

Namun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan geopolitik global, kita harus menyisihkan untuk *automatic adjustment* sebesar Rp154.021.000.000,00. Sehingga pagu alokasi anggaran untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp3.050.000.000.000,00 lebih.

Dapat kami sampaikan bahwa hingga posisi tanggal 22 Mei 2023, dari pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp809.000.000.000,00 atau 25,26%.

Kami optimis dengan kerja keras dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, target realisasi kami akan dapat tercapai.

Kemudian terkait dengan pagu indikatif Kementerian Sekretariat Negara tahun 2024, sebagai bahan RAPBN tahun anggaran 2024 dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

Target PNPB Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2024 kami tetapkan sebesar Rp470.178.000.000,00 lebih yang terdiri dari target PNPB GBK dan Kemayoran, serta PNPB lainnya dari Kementerian Sekretariat Negara.

Terkait dengan pagu indikatif Kementerian Sekretariat Negara memperoleh pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2.650.162.000.000,00 lebih atau kenaikan sebesar 1,55% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp2.609.000.000.000,00.

Namun jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023, setelah penyesuaian yang sebesar Rp3.204.000.000.000,00 lebih. Pagu indikatif tersebut mengalami penurunan sebesar 17,30%. Pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1.370.000.000.000,00 lebih, dan
- Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan alokasi sebesar Rp1.279.000.000.000,00 lebih.

Demikian rincian atau target PNPB pagu belanja dan informasi kinerja dalam rencana kerja Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan pagu indikatif tahun 2024, dan kami sajikan pada Lampiran III.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa butir pengantar yang dapat kami sampaikan. Apabila Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Anggota Komisi II masih ingin pendalaman, kami telah menyiapkan rincian penjelasan yang diperlukan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalaikumsalam Warahmatullah.

Terima kasih, Saudara Sesmen.

Selanjutnya, yang mewakili Kepala Staf Presiden, silakan.

DEPUTI PERWAKILAN KEPALA STAF PRESIDEN (JALESWARI PRAMODHAWARDANI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**Yang kami hormati Ketua Komisi II, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung,
Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Bapak Sekretaris Kabinet,
Bapak Sekretaris,
Bapak Menteri Sekretaris Negara atau yang mewakili, dan
Kepala BPIP,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,*

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini, kami diminta untuk menyampaikan penjelasan terkait rencana kerja tahun 2024 dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022.

Pertama, kami sampaikan terlebih dahulu penjelasan terkait rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut:

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian, Sekretariat Negara Nomor B26/KSN/S/VR002/04/2023 tanggal 18 April 2023, hal Pagu Indikatif Unit Organisasi atau Satker pada bagian anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2024. Kantor Staf Presiden mendapatkan Pagu Indikatif Tahun 2024 sebesar Rp122.033.004.000,00.

Pagu Indikatif tahun 2024 tersebut, dialokasikan untuk 2 program yaitu:

- pertama program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp10.081.346.000,00 dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik; serta

- kedua program dukungan manajemen sebesar Rp111.951.658.000,00 dengan kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Kantor Staf Presiden.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati serta,
Hadirin yang berbahagia,**

Pagu Indikatif Tahun 2024 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp254.420.000,00 atau 0,2% apabila dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran tahun 2023.

Rincian Pagu Indikatif Kantor Staf Presiden Tahun 2024 kami sajikan dalam tabel pada lampiran 1 bahan pengantar ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati serta,
Hadirin yang berbahagia,**

Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan terkait pelaksanaan anggaran tahun 2023. Kantor Staf Presiden mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp121.778.584.000,00.

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B21/KSN/S/PR0001/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, hal *automatic adjustment* belanja pada bagian anggaran 007, Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023, pagu alokasi anggaran tahun 2023, Kantor Staf Presiden mendapatkan *automatic adjustment* sebesar Rp6.185.477.000,00 Dengan demikian, apabila memperhitungkan *automatic adjustment* tersebut, maka Pagu Alokasi Anggaran Kantor Staf Presiden Tahun 2023 yang dapat digunakan saat ini adalah sebesar Rp115.593.107.000,00

Adapun capaian realisasi anggaran sampai dengan 22 Mei 2023, sebesar Rp38.460.228.372,00 atau 31,58% dari alokasi anggaran tahun 2023.

Rincian realisasi anggaran kami sajikan dalam tabel pada lampiran 2 bahan pengantar ini.

**Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati serta,
Hadirin yang berbahagia,**

Sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, berikutnya kami akan menyampaikan penjelasan terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

Kantor Staf Presiden mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp105.784.896.000,00. Capaian realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp105.173.742.771,00 atau 99,42% dari alokasi anggaran tahun 2022. Rincian realisasi anggaran kami sajikan dalam tabel pada lampiran 3 bahan pengantar ini.

Realisasi anggaran tahun 2022 tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi 39 program prioritas nasional, pengelolaan 8 strategi komunikasi politik, dan 20 bidang diseminasi informasi, serta pengelolaan 240 isu strategis dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, dalam pengendalian program prioritas nasional, KSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, antara lain:
 - Proyek hulu migas jambaran tiyung biru;
 - Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas kora, korporasi petani;
 - Penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar.

- Kedua, komunikasi politik dan diseminasi informasi untuk mendukung pengendalian program prioritas dan pengelolaan isu strategis dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam empat kegiatan yaitu:
 - Penyusunan strategi komunikasi yang ditujukan kepada para pengampu kepentingan;
 - Monitoring pemetaan isu dan faktor strategis, serta berbagai bincang media baik lokal maupun nasional;
 - Pelaksanaan komunikasi politik untuk menampung berbagai aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat; serta
 - Penyusunan konten diseminasi informasi yang sesuai dengan bidang yang dipantau kedeputan Kantor Staf Presiden.

- Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan isu strategis, dilaksanakan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait selama tahun 2022 mencapai 266 isu strategis dan 189 isu telah diselesaikan, diantaranya:
 - Terlaksananya percepatan penyelesaian pengadaan lahan dan penanganan lahan perkebunan dalam pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat Tarutung Sibolga;
 - Terlaksananya percepatan penyusunan regulasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah;
 - Terlaksananya percepatan implementasi tahap 2 program pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2022 dalam rangka implementasi konvergensi per program penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - Terlaksananya percepatan penyelesaian Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Capaian kinerja Kantor Staf Presiden tahun anggaran 2022 dan penjelasannya, beserta rencana kerja tahun 2024, kami sajikan dalam tabel pada lampiran 4 bahan penghantar ini.

Perkenankan kami sampaikan ucapan terima kasih atas semua dukungan dan rekomendasi dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR

RI. Berkat dukungan dan rekomendasi tersebut, pada tahun anggaran 2021 dan 2022 secara berturut-turut Kantor Staf Presiden mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan untuk kategori indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA dengan predikat "peringkat pertama".

Semoga dukungan dan sinergi yang terbina selama ini, dapat terus kita pelihara di masa-masa yang akan datang, demi peningkatan kinerja Kantor Staf Presiden.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati serta,
Hadirin yang berbahagia,**

Demikian beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja hari ini. Dan kembali kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang telah bekerja sama dengan baik, serta memberikan dukungan kepada kantor staf presiden.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Ibu yang mewakili Kepala Staf Kepresidenan.

Selanjutnya, kami persilakan Kepala BPIP.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

**Yang terhormat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,
Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung,
Yang terhormat Wakil Ketua beserta,
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat dan saya hormati Sekretaris Kabinet Indonesia,
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia; dan
Para hadirin sekalian yang berbahagia,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Pancasila,

Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Izinkan kami menyampaikan bahwa pada tahun 2022 berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S909/MK.02/2021 tanggal 4 Oktober 2021, perihal penyampaian pagu anggaran, alokasi anggaran kementerian/lembaga tahun 2022. BPIP mendapatkan alokasi anggaran sebesar atau senilai

Rp343.877.246.000,00 dalam rangka kelanjutan penanganan Covid-19 dan ekonomi nasional terdapat alokasi pagu blokir dan tambahan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu:

Satu, Surat Kementerian Keuangan Nomor S100, mohon maaf, 1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *automatic adjustment* belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2022, BPIP mendapat *adjustment* sebesar 5% dari total Alokasi Anggaran Tahun 2022, yaitu Rp17.193.862.000,00.

Surat Kementerian Keuangan No S/2, mohon maaf, 458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022, perihal penambahan *automatic adjustment* belanja kementerian/lembaga tahun 2022 yaitu, Rp16.229.735.000,00.

Pada Tahun 2022, BPP juga mendapatkan tambahan anggaran dalam, dalam program Paskibraka. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 8 Juni 2022, Nomor S158/MK.02/2022, perihal penambahan, penetapan satuan anggaran bagian anggaran 99908, saba 9908 dari BA BUN, penambahan belanja lainnya, untuk program Paskibraka sebesar Rp11.236.974.000,00, sehingga alokasi anggaran BPIP pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp321.690.623.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Realisasi anggaran BPIP pada tahun 2022 sebesar Rp308.446.284.629,00 atau sebesar 98, oh mohon maaf, 95,88% dari total pagu. Ada pun rincian realisasi anggaran per-program adalah sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp158.173.945.912,00 atau sebesar 96,66%.
- Program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp150.272.338.067,00 atau sebesar 95,08%.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR yang kami hormati,

Berdasarkan laporan perusahaan BPK Nomor 50.A/LHP/IX, XV/05/2022 tanggal 20 Mei 2022, perihal laporan pelaksanaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021, BPIP mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pada tahun 2021, sehingga dapat kami informasikan BPIP telah mendapatkan 3 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian pada tahun 2019, 2020, dan 2021.

Pimpinan, dan Anggota Komisi II DPR yang kami hormati,

Sebelum kami memaparkan tentang rancangan keuangan tahun 2024, perkenan kami menyampaikan hal-hal terkait anggaran BPIP tahun 2023.

- a. Alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp357.496.465.000,00.
- b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022, hal *automatic adjustment* belanja kementerian/lembaga

tahun anggaran 2023, sebesar Rp28.599.717.000,00 sehingga, pagu BPIP tahun 2023 menjadi Rp328.896.768.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 sebesar Rp126.457.752.487,00 atau sebesar 38,45%.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Selama kurun waktu 5, dilewati saja ya. Ini *nggak* usah ya, ini aja.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Berikut adalah struktur alokasi anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja operasional sebesar 30% atau sebesar Rp103.251.412.000,00 yaitu:
 - belanja operasional pegawai 001, sebesar Rp74.001.412.000,00; dan
 - belanja operasional perkantoran atau 002, sebesar Rp29.250.000.000,00
- Belanja non operasional sebesar 70% atau senilai Rp237.875.785.000,00 yang termasuk didalamnya pagu prioritas nasional atau PN senilai Rp131.902.413.000,00.

BPIP memiliki 2 program dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pancasila yaitu:

- Dukungan manajemen sebesar Rp181.483.000.000,00.
- Dua, program Pemuda Pancasila sebesar Rp159.649.714.000,00.
-

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan besaran alokasi anggaran pada unit Eselon I BPIP dengan pembagian anggaran sebagai berikut:

- Sekretariat Utama sebesar Rp181.477.483.000,00,
- Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan sebesar Rp77.682.408.000,00;
- Deputi Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebesar Rp11.500.000.000,00;
- Empat, Bidang, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi sebesar Rp12.650.000.000,00;
- Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp25.942.676.000,00;
- Deputi Bidang Pengendalian Evaluasi sebesar Rp31.874.630.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI kami hormati,

BPIP melakukan beberapa kegiatan strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi, 1. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara kementerian dan lembaga dan perangkat daerah.

2. Perjanjian kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait dengan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih diklat pembinaan ideologi Pancasila.
4. Penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan dan penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila.
5. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
6. Pelaksanaan pelatihan *training of trainer*.
7. Standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pancasila.
8. Kajian pembangunan semesta berencana.
9. Penyempurnaan dokumen ekonomi Pancasila.
10. Penerapan buku ajar dan *pilot project* penerapan buku Pancasila untuk nasional.
11. Seleksi atau penetapan dan pengarahannya Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

BPIP mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp149.181.317.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman nilai Pancasila melalui sosialisasi Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp40.000.000.000,00;
2. Penguatan branding lembaga badan hukum Pancasila sebesar Rp15.000.000.000,00;
3. Fasilitasi pelaksana Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebesar Rp28.754.092.000,00;
4. Penguatan rekomendasi bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi sebesar Rp9.220.541.000,00;
5. Rekomendasi hasil kajian implementasi nilai Pancasila sebesar Rp2.396.238.000,00;
6. Rekomendasi arah kebijakan dan internasionalisasi dan ...(suara tidak jelas) Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah sebesar Rp1.500.000.000,00;
7. Penyelenggaraan diklat pembentukan ideologi Pancasila kepada generasi muda dan organisasi lainnya sebesar Rp25.000.000.000,00;
8. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp27.310.446.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat hari ini. Kiranya apa yang telah kami sampaikan mendapat tujuan dan Pimpinan, dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Pancasila.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Salam Pancasila,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Kepala BPIP.

Bapak/Ibu Pimpinan, dan Anggota DPR RI,

Tadi kita sudah mulai rapat dan hari ini cuma dihadiri oleh Saudara Seskab, Pak Mensesneg dan Kepala KSP, itu minta izin karena ada kegiatan, terutama dengan Pak Presiden. Dan tadi Pak Seskab juga sudah minta izin pukul 15.30 WIB ini juga harus bergabung bersama dengan Presiden.

Oleh karena itu, tadi saya sudah menetapkan waktu kita sampai dengan 15.30 WIB, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembahasan penjelasan, pembicaraan pendahuluan ini. Masing-masing mitra kerja kita hanya menyampaikan penjelasan dulu tentang Pagu Indikatif. Dan kalau misalnya ada usulan penambahan, nanti akan kita lakukan lagi pendalaman pada pertemuan berikutnya, minggu depan ya.

Oleh karena itu, saya kira kita fokus aja kalau memang ada tanggapan, bicara tentang soal anggaran ya. Anggaran saja ya, jadi jangan kemana-mana toh juga orangnya juga sebentar lagi tidak ada sama sekali, begitu.

Silakan, Pak Gaus saja kalau begitu. Mewakili, Pak. Silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, terima kasih.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menseskab,
Sekretaris Kabinet, diwakili oleh Sesmen,
Pak Kepala Staf Kepresidenan, diwakili oleh Sekretaris Deputi dan,
Prof. Kepala BPIP dan,
Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan,**

Saya langsung saja masuk kepada persoalan sebagaimana dikemukakan oleh Ketua, kita belum bicara tentang detail-detail dan pembahasan terhadap apa yang Bapak, Ibu sampaikan.

Pertama, saya masuk ke Kementerian Sekretaris Negara. Di mana disampaikan di sini BNPB mencapai target yang luar biasa. Biasanya target itu melampaui hanya 100%. Saya tidak tahu apakah masalah perencanaan yang kurang pas dan lain sebagainya, sehingga lompatannya atau memang bisa juga prediksi, prediksi di luar kemampuan. Jadi, sangat variatif dan saya juga tidak bisa mengklaim kesalahan perencanaan dan lain sebagainya. Malah, BNPB ini bisa mencapai 110,36%. Tentu kita berikan apresiasi.

Namun saya lihat, target untuk tahun 2023 tidak seperti lampauan, harusnya kan kalau lampauanya itu adalah 446, harusnya 2023, harus melampaui dari 446 itu, karena kita sudah mencapai. Ternyata di 2023 kurang dari target, yaitu 436M. Sedangkan capaian 2023, 22 adalah 446, turun 10M. Apalagi pandemi Covid sekarang tidak ada lagi, itu yang pertama.

Yang kedua, yang ingin juga saya sampaikan, pernah juga di ekspose oleh berbagai mass media tentang Hotel Sultan. Saya melihat di situ harus ada konsistensi dan keberanian pemerintah terhadap, saya baca sejarahnya terlalu panjang untuk saya ungkapkan bagaimana kronologis jaman orde baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya, dicaplok. *Nah*, ini tolong bagaimana pula penyelesaian terhadap Hotel Sultan yang merupakan aset negara ini. Apakah sudah tuntas dan ini sudah sepenuhnya milik negara?

Kemudian, saya masuk kepada capaian BNPB sekarang sudah bagus. Saya mencatat ada ini yang 9, 10, 11, 12 sekarang ini, kementerian dan lembaga yang kita bahas, kemarin 7, tadi pagi 8, sekarang adalah 9, 10, 11, 12. Rata-rata capaian anggaran itu untuk Mei 2023 tidak ada yang mencapai 40. BNPB pada hari ini mencapai 40,48, tentu saya diberikan apresiasi terhadap hal-hal yang berkaitan pendapatan yang dilakukan oleh Sekretariat Negara dalam mengelola aset negara ini.

Namun, saya ingin juga bertanya tentang realisasi anggaran tahun 2023, ini agak kecil. Saya bisa sampaikan LAN 30 memang kecil anggarannya, ANRI 31, Ombusman 33, Mendagri 39.

Kemudian tadi kita dengan BPN ATR itu bisa mencapai adalah 27,51. Sekarang, Sekretariat Negara hanya mampu merealisasikan anggaran ini sampai Mei 2023 hanya, termasuk belanja BLU 25,28, sedangkan tidak termasuk belanja BLU 22,63. Tentu, saya berharap ini digenjot, karena bagaimana pun serapan anggaran berpengaruh terhadap dinamika ekonomi.

Kemudian, anggaran 2024 saya lihat turun, kasihan juga kenapa? Padahal ini masa-masa yang mengakhiri jabatan presiden. Apakah memang tidak ada, apakah sudah tercapai target diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden sehingga anggaran waktu turun 17,30%. Dulunya adalah 3,2T sekarang hanya 2,65. Tolong juga dijelaskan lagi apa indikator sehingga menurut apalagi Bapak ini kan orang yang di lingkaran Pak Presiden. Berapa saja disebut kepada Ibu Sri Mulyani, saya yakin dan percaya akan diakomodir kalau memang itu adalah sesuatu yang sangat rasional.

Kemudian, saya tadi terlambat karena kita tadi berpacu dengan waktu, saya tidak mendengarkan paparan dari Mensesneg dan Menseskab dan juga dari juga saya tidak dengar dari Ibu Deputi tentang apa-apa saja keberhasilan, apa *reward* yang didapatkan.

Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Menseskab bahwa, *reward* yang didapatkan salah satu diantaranya adalah WTP semenjak beliau menjadi Menteri dipercaya oleh Pak Jokowi 8 kali berturut-turut mendapatkan wajar tanpa *eh* tanpa pengecualian, ini adalah sebuah prestasi dan kami Komisi II tentu sangat bangga.

Tadi Prof juga menyampaikan selama 3 tahun, dulu kita marah-marah sama Prof ini. Tapi dengan beliau tidak lagi macam-macam, saya ini sahabat ini Prof ini, Prof beda nuansa kampus dengan nuansa jabatan publik. Oleh karena itu, tolong ngomongnya agak ditekan sedikit, saya alhamdulillah wajar tanpa syaratnya juga mampu beliau dapatkan. Selamat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Yang dimaksud macam-macam itu bagaimana?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Biar saya bedua aja yang tahu. Dulu kan dinamikanya saya paham apa yang beliau sampaikan Ketua. Kalau di kampus apa yang beliau sampaikan saya setuju. Tapi di ranah luar ini dinamikanya waduh beliau ini teman saya ini, Prof dihajar oleh siapapun Prof, padahal Prof ini adalah kiyai, lebih kiyai daripada kiyai. Kenapa?

Beliau kan memproduksinya kiyai. Dia tahu betul bagaimana posisi Al-Quran dan Sunnah, bagaimana juga posisi Undang-Undang Dasar, Pancasila dan sebagainya.

Kalau ke saya diberikan itu saya paham tapi jangan untuk ke publik karena salah *miss* dalam menyikapi apa yang Prof sampaikan. Ini dipancing oleh Pak Ketua, sebetulnya saya *nggak* mau terlalu banyak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ya sudah-sudah cukup sampai itu saja, nanti jadi *nggak* WTP lagi nanti gara-gara berlebihan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Jadi saya berikan apresiasi.

Saya langsung masuk ke apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, nilai 2022 realisasinya cukup bagus 96 luar biasa melebihi dari kawan-kawan yang lain. Tapi belum bisa mencapai seperti

di Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri 99,11 luar biasa.

Artinya, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita ber-*fastabikul khairat* dalam pencairan dana anggaran, karena bagaimana pun berpengaruh terhadap dinamika ekonomi, masyarakat sangat beragam.

Tapi dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain ada yang mendapatkan 96, 95, kemudian 97 juga ada, yaitu dari LAN itu anggarannya sangat kecil, KPU juga 96 artinya saya memberikan apresiasi kepada Pak Mensekab yang juga sangat luar biasa di atas rata-rata yang saya lihat. Oleh karena itu, ini apa namanya prestasi yang didapatkan ini harus tetap dipertahankan kalau dapat ditingkatkan.

Kemudian di 2023 saya kencangan cepat-cepat aja bicaranya. Luar biasa, realisasi anggaran 2023 hari ini 45,60% wah ini *nggak* ada yang menandingi, 45,60%.

KPU yang sedang sarat mengeluarkan dana pun hanya 40,83. Ini yang saya lihat dari yang sudah kita lakukan RDP pembahasan anggaran ini kemarin 7 pagi 8, sekarang tambah 4 *nggak* ada yang di atas ini. Tentu saya memberikan apresiasi dan mudah-mudahan ditiru juga oleh kawan-kawan dari kementerian dan lembaga yang lain.

Terakhir, saya lihat di sini adalah 2024. Bahwa anggaran yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan bersama Bappenas pagu anggarannya adalah 348 dan permintaan yang 16M ini, menurut hemat saya terlalu kecil. Oleh karena itu, mungkin ada hal-hal lain terobosan yang ingin Pak Menteri sampaikan tadi, saya memancing Pak Menteri saja ini.

Kenapa? BPN APR anggarannya tujuh koma sekian, ditambah menjadi tadinya minta 7 tanggal 14 April dia *sowan* kepada Pak Jokowi ini strategi ini Pak Menteri. Bapak dekat dengan Pak Jokowi kemudian dia omong dengan Ibu Sri Mulyani, akhirnya minta tambahan anggaran 4,1 sekian triliun dari 7 anggaran yang awal. Kenapa hanya Mensekab meminta 16M ini, ini terlalu apakah terlalu apa-apa? Saya *enggak* tahu juga terlalu elok orangnya mungkin ya sehingga *enggak* macam-macam terhadap tambahan anggaran itu.

Berikutnya adalah Mensekab eh KSP ya KSP, Mensekab sudah. KSP tadi sudah disampaikan bahwa anggaran tahun 2023 itu 115 juta kemudian terealisasi 31. Jadi sedang-sedang saja, tidak signifikan, karena yang lain juga *me-anu* memunculkan anggaran yang lebih signifikan daripada apa yang saya paparkan tadi. Namun ini lebih hebat lagi, capaian anggaran realisasi anggaran 2022 melampaui dari siapa yang saya sebutkan tadi, lembaga, di mana KSP, ini tolong sampaikan salam saya kepada Pak Muldoko, eh Pak Muldoko KSP-nya kan? Belum berubah belum diganti kan?

Ya jadi tolong sampaikan salam saya bahwa yang bisa mencapai 99,42% itu di mitra kami belum ada yang di atas ini. Karena yang di KSP ini 99,42 yang paling tinggi sebelum kami bahas ini adalah Kementerian Dalam Negeri jumlahnya adalah 99,11% *the best*. Oleh karena itu tolong ini juga dalam pelaksanaan kegiatan 2023 ini bisa dipertahankan kalau bisa makin ditingkatkan.

Kemudian di anggaran 2024, meminta anggaran tambahan *anu* anggaran pagunya adalah 122 juta, ya kecil-kecil amat, mungkin yang paling rendah setelah Prof BPIP. Data-data kita memang mitra kita ini ratusan, yang T itu hanya 3 Kementerian, Mensekab, Mensetneg, bukan Mensekap, Mensekab ya, kemudian BPN ATR, kemudian Kementerian Dalam Negeri, saya berikan apresiasi.

Kemudian terakhir kepada Prof yang sangat luar biasa. Saya lihat realisasi anggaran untuk 2023 ini adalah 38,45 termasuk pemakaian anggaran yang saya lihat dari data ini, termasuk juga termasuk bagus, peringkat 3 kalau saya nilai.

Kemudian kalau realisasi anggaran 2022 95,88. Saya lihat anggaran yang diajukan ini juga sangat kecil. Tadi minta tambahan anggaran adalah 149 M, hafal saya Prof ini, karena jangan sampai ini tidak disetujui oleh kawan-kawan, tapi *Insyallah* Prof, tidak pernah Komisi II manakala mitranya meminta tambahan anggaran atau untuk dipertahankan, itu merupakan adalah komitmen kami. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana sosialisasi tentang tugas dan fungsi Prof sebagai kepala BPIP ini makin dimasifkan. Karena kami lihat memang apalagi kaum milenial sekarang ini Prof, dia *nggak* mengerti apa itu Pancasila, tidak mengerti apa itu Undang-Undang Dasar 45, tentu ini sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu, bagaimana Prof mengelola ini bisa masuk kepada kurikulum, bisa masuk kepada silabus, sehingga pemahaman anak-anak ke depan ini-ini perlu kita *wejawantahkan*. Ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Prof yang sudah diberikan amanah oleh Bapak Presiden.

Barangkali demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Waalikumsalam warahmatullah.

Seperti biasanya Pak Gaus cukup lengkap sekali dan saya kira sudah mewakili kita semua.

SEKRETARIS KABINET INDONESIA (Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Pimpinan, boleh interupsi.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya-iya silakan.

SEKRETARIS KABINET INDONESIA (Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Saya mohon maaf minta, kalau diizinkan oleh Pimpinan minta diizinkan karena jadwal dengan Bapak Presiden.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya tadi memang sudah minta izin sampai 15.30.

Silakan Pak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

.....(suara tidak jelas tanpa mic).

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Oh ya boleh lah, lima menit? Dua menit? Cukup?

Silakan.

SEKRETARIS KABINET INDONESIA (Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Ketua, Wakil Ketua yang kami hormati,

Atas permintaan Pak Gaus, kalau Pak Gaus minta itu harus dituruti kalau *nggak* dituruti bisa lahir batin kita berbahaya.

Jadi, Pak Gaus yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Yang kedua, tentunya angka kecil bukan berarti kita tidak efisien, karena memang lembaga di presiden semua pengeluarannya pasti sangat transparan dan terbuka.

Kenapa kami hanya meminta tambahan 15 miliar, 16 miliar? Karena memang itu yang dibutuhkan, dan kami terus terang 10 kali udah WTP dan selalu mendapatkan nilai di atas 95, 96. Biasanya tertinggi sehingga dengan demikian pasti digunakan dengan sebaik-baiknya.

**Sekali lagi Ketua,
Wakil Ketua yang kami hormati,**

Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai tapi ada Bapak, Pak Fadlan Wakil Sekretaris Kabinet, beliau yang akan mewakili.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Walaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih, Pak Seskab.

Silakan Pak Junimart.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Ketua.

Saya mau sedikit saja kepada KSP ya, sayang Pak Moeldoko tidak di sini. Ini Kantor Staf Presiden mendapatkan pagu alokasi anggaran Rp105.784.896.000,00. Capaian realisasi itu Rp105.173.742.771,00 atau 99,42%. Nah, di sini disebutkan bahwa KSP itu menggunakan dalam rangka kegiatan *monitoring* dan evaluasi 39 program prioritas nasional pengelolaan 8 strategi komunikasi politik dan 20 bidang desiminasi informasi, serta pengelolaan 240 isu strategis begitu ya, 784.

Nah, saya mau masuk ke kode 5969 tentang pengendalian program-program prioritas nasional, isu strategis dan komunikasi politik. Kepada Bapak, Ibu dari KSP, saya ingin bertanya sedikit tentang pengendalian isu strategis ya hubungannya menyangkut pertanahan ya.

Pengamatan kami selama ini KSP tidak pernah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Ya kadang-kadang berbenturan juga ya di daerah itu. Contoh misalnya, ketika saya *cross check* ke Kementerian ATR/ BPN, KSP itu tidak pernah melakukan komunikasi untuk mencari solusi yang solutif terhadap permasalahan atau konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan kami bagaimana cara kerja KSP di dalam mengendalikan.

Apakah KSP sudah menjadi pengendali? Iya kan. Sehingga KSP itu betul-betul bisa membuat masyarakat itu mendapat suatu kepastian hukum. KSP tidak asal turun aja terus ramai-ramai aktuaria di bawah ya, ketemu kepala daerah bicara A, B, C, D, E, F, G tapi tidak ada realisasi. Ini saya dapat informasi dari kepala daerah. Kan begitu, tolong KSP koreksi, kadang dikoreksi.

Jangan KSP itu yang turun ke bawah merasa bahwa mereka itu perpanjangan ataupun perintah Pak Presiden. Kita juga bisa langsung *cross check* ke Presiden mengenai ini, kan begitu ya dan saya juga bisa lapor langsung ke Pak Presiden mengenai konflik-konflik pertanahan. Ini perlu kami garisbawahi, bahwa KSP itu tidak pernah koordinasi.

Ya bahkan mohon maaf ketemu saya aja di daerah itu tidak pernah saling tegur. Ini KSP ada apa ini? Ya, harus tahu tupoksi juga KSP ini iya kan, jangan kalau anggaran ke sini minta tolong, minta bantuan, kita ketok setelah itu istilah mereka itu *leong* dia, tolonglah.

Apa hasil kerja dari KSP itu ketika turun ke daerah?

Saya sudah sampaikan ke Pak Muldoko mengenai ini, di *WhatsApp*, beliau mengatakan akan *cross chek* kepada para deputi. Ini perlu, ya Ibu Deputi yang duduk di depan, supaya ini menjadi masukkan ke depan ya.

KSP bicara masalah kawasan hutan misalnya. Apa yang KSP tahu masalah hutan misalnya? Apa KSP tahu ketika sertifikat hak milik itu menjadi kawasan hutan, tahu *nggak*?

Ini orang KSP semua kan di belakang ini, tahu *enggak*? Sertifikat itu menjadi Kawasan hutan tahu *enggak*? Kalau tahu, terus bagaimana solusinya? Begitu loh.

Pernah *nggak* KSP ya diundang KLHK dengan Kementerian BPN menyelesaikan ini? Jadi *nggak* perlu delik sendiri di lapangan. Saya perlu sampaikan ini kepada KSP, begitu loh.

KSP bicara kehutanan di sini, bicara ATR/BPN. Saya *cross check* tidak pernah KSP mempertemukan kedua Kementerian ini. Terus laporannya apa ke Pak Presiden mengenai ini?

Tolong jangan terlalu genit juga teman-teman KSP di bawah sana begitu loh, sama-sama kita. Kami ini ngurusin tanah rakyat juga Bapak/Ibu begitu loh.

Saya bicara begini, saya mengamati sudah lama ini. Cobalah begitu, apa yang bisa kalian lakukan terhadap konflik pertanahan, terhadap konflik masyarakat dengan perkebunan apa? Bajambi selesai *nggak*? Saya mau tanya, siapa yang ada di sini dari Bajambi? Ada *nggak* di sini? Ada *nggak* yang pernah ke Bajambi? Ada *nggak* di sini orangnya? Mana orangnya Bu? Saya mau tanya langsung.

Sampai sekarang itu Bajambi WA saya terus, "Pak KSP sudah turun, sudah datang?" tapi *nggak* ada jawaban sampai sekarang, mereka berjanji terus menyelesaikan, kan malu kita begini. Di sini ada nanti saya *forward* ke deputi, begitu loh.

Jadi apa kerja KSP ini? Habisin anggaran saja kalian ini, kan *nggak* boleh begitu, iya kan.

Di sini bicara KLHK, bicara BUMN, bicara ATR/BPN, pernah *nggak* KSP mengundang para Kementerian ini? Tidak pernah.

Saya udah cek begitu loh. Bagaimana solusi yang bisa diberikan KSP, ketika terjadi sertifikat itu menjadi kawasan hutan, apa solusi KSP? Ada *nggak* solusinya? Iya kan. Jadi jangan terapkan pola-pola protokoler.

Bapak ini pelayan rakyat, kami ini babu rakyat begitu loh. Ini perlu kami sampaikan, supaya kita paham semua jangan gagah-gagahan di sini begitu loh. Ada *nggak* yang pernah dari Bajambi?

Saya tahu ada di sini tapi *nggak* ada yang ngaku kan begitu loh.

Baru-baru ini ada yang dari Simalungun, saya sebut nama, boleh *nggak* sebut namanya? Dia bukan Deputi. Ada deputi yang pernah ke sana, ada yang bukan deputi tapi *nggak* ada solusi.

Ini kita bicara anggaran ini sekian banyak anggarannya ini.

Apa yang kalian kerjakan? Tolonglah betul-betul kerja sesuai dengan ya surat-surat yang masuk langsung yang disampaikan Pak Presiden.

Lapor ke Pak Presiden apa hasilnya, begitu loh. Itu kan tugas deputi sebenarnya. Ini menjadi koreksi kami kepada KSP.

Saya tadi berharap terhadap Pak Muldoko di sini dan saya mau buka semua, bagaimana kinerja orang-orang di KSP itu di bawah.

Jangan sombong kalau di bawah begitu. Jangan merasa jadi pejabat kalau turun ke daerah, mohon maaf. Saya punya bukti rekamannya semua ini begitu. KSP tidak pernah begini, tapi sekarang kenapa begini KSP?

Saya yakin Pak Moeldoko tidak tahu, begitu. Ini *nggak* ada yang ngaku nih yang pernah ke Bajambi, saya sebut nama pasti berdiri dia, ayolah begitu loh. Jadi jangan bicara pengendalian, ya tentang isu strategis tapi *nggak* ada solusi yang solutif. Prof, sama-sama kita bisa.

Kami tidak minta, kami bukan minta diundang tapi etikanya itu KSP itu mengundang kami Komisi II dan KSP juga tahu bahwa kami sudah pernah turun ke Bajambi, sana.

Saya perintahkan kepada masyarakat supaya tetap menguasai lahan tersebut, karena kawasan itu kawasan sengketa yang sudah lama dikuasai masyarakat. Saya minta ukur itu lahan PTPN-nya, nanti kami akan dalam minggu depan tentang kerja-kerja dari KSP ini, tolong siapkan bahannya. Saya akan bongkar semua nanti, saya akan bongkar begitu loh. Nanti minggu depan

kita ketemu. KSP siap-siap saja saya bongkar di sana, saya akan sebut nama di sana.

Jadi, kepada rakyat itu jangan berjanji, selesaikan. Rakyat sudah senang ketika KSP turun ke sana, "iya saya Pak dari KSP akan turun", dia kirim suratnya loh ke kami namanya si ini-ini-ini, saya bilang silakan.

Pak, mereka berjanji 3 minggu ada jawaban, *eh* sampai sekarang Pak *nggak* ada jawaban. Loh *piye toh* KSP-nya begitu loh. Ini bagaimana kerja dia, anggaran bejibun begitu, tolonglah. Kami tidak marah, kami hanya mengkoreksi sebagai mitra kerja. Hargai rakyat, tanpa rakyat kita tidak bisa duduk di ruangan ini, Bapak, Ibu juga demikian begitu loh. Tolong disiapkan minggu depan, saya akan buka semuanya dan saya akan *print* WA saya.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart.

Pak Yanuar.

F-PKB (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya dua hal saja, yang pertama kepada KSP dan nanti kedua kepada BPIP.

Yang KSP, karena Pak JG sudah menyampaikan soal ini. Saya *stressing* kepada KSP dan tanah IKN Bu.

Tanah IKN, karena beberapa waktu kemarin Pak Moeldoko juga sudah memberikan konsentrasi yang bagus kepada perhatian kepada soal tanah IKN, terutama kaitannya dengan pengadaan tanah IKN.

Kita juga mendengar kemarin dibentuknya satgas pengadaan tanah IKN, betul Bu ya? Satgas pengadaan tanah IKN, yang saya mendengarnya di media itu betul atau *nggak*? Atau itu baru rencana? Karena Pak Jokowi yang yang mengajukan usul ini. Satgas pengadaan tanah IKN.

Jika ini benar ada, tentu bagi kami menjadi pertanyaan satgas pengadaan tanah IKN itu memberikan arti bahwa BPN tidak maksimal bekerjanya, otorita IKN tidak maksimal bekerjanya dan KSP tidak maksimal bekerjanya untuk urusan yang satu ini. Sehingga untuk urusan pengadaan

tanah untuk IKN Pak Jokowi sampai mengambil ide untuk membentuk satgas. Coba dicek Ibu, informasi ini karena ini penting buat kita dan publik juga bertanya-tanya tentang ide-ide yang satu ini.

Karena kita tahu di lapangan pengadaan tanah untuk IKN tidak semudah yang dibayangkan oleh Jakarta kira-kira begitu, itu satu. Jadi mohon untuk mendapat *note*, perhatian yang penting untuk soal ini.

Yang kedua BPIP. Terima kasih Pak Profesor, Pak Yudian.

Beberapa program strategis ini luar biasa dan menarik buat saya Pak. Ada standarisasi kurikulum diklat ideologi Pancasila, ada kajian soal dokumen-dokumen Pancasila, ada juga soal pelaksanaan ToT dan seterusnya, penentuan arah kebijakan dan seterusnya.

Pak, yang sudah dilakukan selama ini bentuknya dokumen atau apa naskah-naskah? Jika diperkenankan Pak, kita juga ingin tahu apa *progress* itu. Jika ada naskah-naskah itu mungkin boleh juga Pak dikirim ke apa ke Komisi II. Karena ini saya kira bagian dari perjalanan intelektual tentang bagaimana kita mulai *mapping* soal Pemasyarakatan Pancasila. Dan kita ingin juga mendalami isu ini pada level yang lebih akademik kira-kira begitu, itu yang pertama.

Yang kedua, usulan tambahan anggaran ini juga ada yang menarik juga, Pak. Ada istilah internalisasi dan institusionalisasi Pancasila. Ini istilah ini luar biasa penting, saya kira menarik di poin 6 ini, cuma dikaitkannya dengan hukum nasional dan peraturan daerah, *it's okey* itu memang penting.

Pertanyaan berikutnya, BPIP apakah sudah menyiapkan juga suatu gagasan besar bagaimana institusionalisasi, internalisasi tentang Pancasila ini juga menjadi bagian penting untuk karir seseorang?

Kita masih ingat zaman orde baru Pak. Meskipun masih ada kritik soal monopoli penafsiran Pancasila tapi dari sudut metodologi, dari sudut metode, teknik, cara, saya kira tidak ada yang terbaik kecuali zaman orde baru Pak. Bagaimana Pancasila bisa menjadi satu *mainstream* besar tentang Indonesia. Meskipun tafsirnya itu menjadi mono tafsir, hanya bagaimana penguasa menafsirkan itu. Tapi saya kira dari sudut metodologinya, metodenya kan bisa di apa bisa di adaptasi dan bisa didalami sehingga Pancasila ke depan betul-betul menjadi bagian penting dari-dari seluruh aspek kehidupan.

Saya ingat betul Pak pada waktu itu caleg saja mesti ada litsus itu Pak, litsus itu yang berkaitan dengan ideologi. Karir seseorang juga *nggak* bisa naik kalo belum pernah ikut penataran. Ada penatarannya pun ada jenjang-jenjang Pak, ada *grade*-nya, ada *level*-nya. Bahkan masuk sekolah saja SMA atau kampus, perguruan tinggi ada penataran itu, sebab kalo *nggak*, *nggak* bisa, bahkan kalo *nggak* ada sertifikat penataran, dia *nggak* bisa ikut kelulusan.

Jadi, pada waktu itu simbol-simbol itu merasuk ke hampir semua segi kehidupan. Bahkan kepada karir seseorang. Saya kira ini dari sudut ini penting untuk menjadi catatan. Tapi tentu saja formulanya harus berbedalah dengan masa orde baru. Tapi ini perlu mendapatkan perhatian kita semua ke depan.

Sehingga saya pribadi berpendapat bahwa posisi BPIP ini ke depan harus jauh diperkuat. Bukan sekedar bagian dari aparatus apa, di lingkungan kepresidenan. Tapi mungkin dia menjadi semacam lembaga negara yang lebih apa lebih-lebih mandiri, lebih independen dan lebih mempunyai otoritas untuk menggagas, mensosialisasikan dan bahkan merancang soal masa depan Indonesia dari sudut pandang Pancasila.

Karena itu penting Pak, saya memberikan catatan ini. Supaya proyek kita ke depan soal Pancasila juga kita punya arah-arah yang sama. Karena di catatan yang ada, di program kegiatan ini masih sifatnya, masih semua masih rintisan lah begitu, sedang menggali, mengkaji, menggali dan seterusnya sehingga kita perlu juga mulai menata *track* ke depannya arah yang mau kita bangun.

Saya tidak membayangkan BP7 zaman dulu Pak. Tetapi saya memandang positif, ada satu lembaga khusus mengurus soal itu, BP7. Dan seluruh dokumen pendidikan, pelatihan, bahkan manggala, trainer, instruktur itu punya standarisasi dari BP7 waktu itu. Jadi kalau BPIP ke depan bisa melakukan ini saya kira luar biasa. Dan itu suatu capaian penting untuk perjalanan Pancasila pasca orde baru. Saya kira itu saja Pak Profesor.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Waalikumussalam.

Silakan Pak Syamsurizal.

F-PPP (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Junimart.

Yang sama-sama kita hormati Kepala BPIP, Pak Prof dan, Sesmenseg tadi ada Pak Sekretaris dan, Pak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia serta, Rekan-rekan Anggota yang berbahagia,

Saya sedikit saja memberikan, menambah apa yang sudah menjadi penekanan oleh Bapak Yanuar tadi soal BPIP.

Berkali-kali kita baik itu ke Papua, ke mana-mana yang kita ketahui adalah posnya, banyak sekali keberagaman yang ada di tanah air ini. Yang jelas saya lihat dari sisi jumlah bahasa yang ada Papua misalnya. Ada 319 bahasa daerah yang masing-masing suku dengan suku lainnya, mereka tidak akan mengerti begitulah keberagamannya dan ternyata Indonesia punya 726 bahasa daerah.

Nah, ini kalau tidak dipersatukan kita akan-akan mendapatkan semacam kesulitan. Oleh karena itu peran Pancasila di sini saya kira sangat perlu sekali untuk masing-masing kita memahami nilai sesungguhnya yang dimiliki dalam Pancasila dan apa fungsi Pancasila untuk kita sosialisasikan.

Nah, yang diusulkan oleh BPIP untuk tambahan anggaran tahun 2024 untuk sosialisasi Pancasila itu kita lihat angkanya masih kecil, 40 miliar saja. Kalau kita lihat luas wilayahnya sepertinya kerja ini tanggung Pak, Pak Prof.

Oleh karena itu, ke depan kami menyarankan mumpung ini adalah tahun-tahun terakhir dari program 5 tahun ke-dua Bapak Presiden kita, tentunya kita ingin itu tersosialisasi dengan baik. Tapi setidaknya-tidaknya tahun 2024 ini jumlahnya agak sedikit memadai. Artinya kita bisa menjangkau pada banyak wilayah, misalnya wilayah Sumatera itu ada beberapa provinsi yang prioritas. Kemudian Kalimantan itu, ada provinsi Jawa juga *oke* apalagi daerah Papua sana.

Jadi, kalau 40 miliar ini saya kira terlalu kecil Pak Prof, saran kami mungkin patut dipertimbangkan karena mungkin ini masih anggaran tambahan. Ya mungkin 10 kali lipat 400 miliar, kenapa tidak? Kalau untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, tentu mereka bakal paham tentang nilai-nilai Pancasila dan apa yang sesungguhnya, selain itu apa perlunya persatuan dan kesatuan yang bisa membangun bangsa ke depan, *nah* ini yang sangat perlu.

Kita punya agama yang berbeda-beda. Tidak mungkin si A itu kita suruh masuk ke agama lain atau si B itu lain tak bisa dipersatukan. Jadi yang bisa mempersatukan itu adalah Pancasila dengan satu landasan dasar ingin kita bersatu padu untuk mencapai Indonesia yang besar ke depan, hanya dengan Pancasila.

Saya kira demikian saran kami untuk kita pertimbangkan, kita memberikan dukungan sepenuhnya untuk tambahan ini. Jangan tanggung-tanggung Pak Prof untuk menambah dukungan dana untuk BPIP ini tahun 2024 sebagai tahun ke-dua terakhir dari periode Bapak Presiden kita.

Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Izin sedikit Ketua menambah.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.):

Silakan.

F-PDI PERJUANGAN (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam Pancasila!

Singkat dan kami tujukan khusus untuk yang terhormat Kepala BPIP. Ingin saya memberikan masukan tanpa bermaksud dan merasa lebih tahu.

Yang pertama, mungkin di samping program-program yang sudah dirancang dan sangat menarik ini perlu ada *focusing* ya mungkin semacam itu lah. Misalnya ketika kita bicara Pancasila dikaitkan dengan terorisme, itu sudah seringkali lah.

Pancasila dihadapkan pada korupsi. Pancasila dihadapkan pada disintegrasi. Mungkin ada lebih khusus lagi Pancasila dihadapkan pada masalah Papua. Mungkin ini pikiran saja Bang ya, itu yang pertama.

Yang kedua, saya senada dengan Pimpinan tadi, Pak Syamsurizal. Mungkin, ini saran aja, BPIP bisa membuat program-program yang strategis. Kalau mau dikelompokkan misalnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tentu dikaitkan dengan visi-misinya. Tidak ada salahnya saya pikir membuat program yang ideal dengan anggaran yang ideal, walaupun mungkin ada yang mengatakan ini *nggak* mungkin, ini *nggak* bisa, tapi paling tidak di satu sisi BPIP itu menunjukkan idealnya seperti ini. Di sisi lain tentu kita berpijak pada realita ya, jadi ada dua sisi.

Kita bisa berharap jika orang melihat yang ideal, *reality* ini masih jauh dari yang ideal siapa tahu kemudian yang membaca itu jadi tahu "oh mustinya ini realita yang seperti ini harus didekatkan kepada yang ideal", contohnya tentang anggaran.

Kalau yang membaca saya mungkin *nggak* ada pengaruhnya. Walaupun saya berpikir mestinya ini harus dikasih yang ideal walaupun tidak bisa ideal atau secara bertahap tidak bisa ideal. Tapi kalau yang membaca Pak Presiden atau calon Presiden yang nanti bakal jadi Presiden, mungkin akan lain ceritanya Pak dan itu yang akan menyajikan BPIP. *Nah* ini urusan Pancasila saya pikir urusan ideal ini Pak. Jadi orang, pemimpin kita yang punya posisi menentukan itu perlu diberi tahu, yang ideal seperti ini. Dan BPIP saya kira tidak salah untuk menyajikan yang kaya begitu, salah satu yang mendukung saya.

Sedikit kebetulan saja, di orde baru saya menjadi Kepala BP7 walaupun di daerah 7 tahun Pak. Jadi saya ingin mendorong Bapak dengan seluruh jajaran, berani saja, kenapa tidak.

Sekali lagi saya ulang, *nggak* ada salahnya membuat rancangan yang ideal. Biarlah realitanya belum, tentu Bapak dari tahun ke tahun masih bicara realit, bisnis itu kan. Tapi kan ke depan harus semakin mendekati yang ideal, yang ideal bagaimana sih? Bapak sajikan. Walaupun itu nanti masih bisa didiskusikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam Pancasila!

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.):

Salam Pancasila!

Cukup ya?

F-P. GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.):

Ya silakan Pak.

F-P.GERINDRA (Drs. DIFRIADI):

Terima kasih.

Mohon maaf saya terlambat, saya tadi dipanggil Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi,
Seluruh Anggota Dewan dan,
Pimpinan Kepala Lembaga Negara,
Pak BPIP,
KSP dan,
Mensesneg,**

Ini khusus untuk BPIP. Saya melihat ada Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Saya berharap BPIP *oke* gaya-gaya metodologi yang disampaikan pada zaman dulu, BP7 saya kira bisa diserap tapi tidak semuanya.

Hanya saran saya, ada *nggak* contoh konten kreatif yang digunakan, konten kreatif di medsos yang-yang menggunakan, itu adalah bagian daripada nilai-nilai Pancasila?

Nah, bentuknya bagaimana? Sehingga itu menjadi gambaran bahwa sosialisasi secara massif di dunia itu sudah kita lakukan.

Karena saya melihat nilai-nilai Pancasila itu tumbuh dan berkembang kepada kita dan anak-anak muda kita sudah sebagian dikontenkan menunjukkan itu, tetapi juga ada konten-konten kreatif yang sebenarnya sudah bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai Pancasila.

Kematian, bullyan, segala macam itu berkembang. Di medsos, di Facebook kalau tidak suka katanya kasar dan macam-macam. *Nah*, ini yang barangkali perlu kita kurangi, kita minimalkan dengan membuat konten-konten kreatif yang sumbernya pada nilai-nilai Pancasila yang barangkali nilai-nilai itu sudah kita sepakati bersama.

Saya pernah sampaikan juga pada periode yang lalu. Ada konten kreatif manis sekali. Seorang apa penyandang disabilitas memberikan tempat kepada orang yang dagang masuk lift, bahwa banyak orang karena lebih tidak bisa masuk lift orang itu. Seorang difabel, disabilitas, penyandang disabilitas, dia keluar sehingga bisa naik. Ini ternyata itu *trend*-nya luar biasa itu pengamalan Pancasila. Artinya, seorang difabel sudah mengalah kepada yang kuat, ini luar biasa. Yang kuat ini tidak Pancasilais, tidak Pancasilais.

Barangkali juga kejadian-kejadian kita di masyarakat, seperti di kereta api yang berjejal itu kurang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai wanita, nilai-nilai walaupun sudah diatur, tapi ketika ini ada orang tua berdiri, ada yang bunting masih berdiri, yang hamil tapi yang masih muda acuh dia.

Ini kan perbuatan-perbuatan yang barangkali dalam konten kreatif barangkali dalam nilai-nilai Pancasila ini, barangkali didikte tapi barangkali dananya tidak terlalu besar. Tapi gunakan orang-orang, aktor-aktor yang menurut. *Nah*, barangkali ini BPIP menilai benar *nggak*, aktor ini bisa *nggak* menjadi duta Pancasila di masyarakat, dia konten kreatif di mana. Saya kira itu lebih-lebih *anu* lebih apa lebih memasyarakat, lebih tersosialisasi dan lebih membumi saya kira itu. Karena penting ini bahwa kita ini milik kita, Pancasila ini milik kita, nilai-nilai yang kita sudah jalani selama ini, yang kita jalani selama ini dan ini sudah menjadi pegangan kita.

Nah, soal anggaran. Saya kira memang kita belum perhatian benar kepada nilai permasyarakatan ini. Jadi kadang-kadang anggaran itu masih pagu indikatifnya, apakah kita kurang usulan atau gimana atau memang pagu indikatif dari-dari atas *top down* itu yang membuat kita *nggak* bisa kreatif.

Tapi kita *nggak* boleh, Pancasila memang harus menjadi acuan kita bersama, apalagi di dunia yang sekarang ini sudah luar biasa di dunia maya itu kata-katanya yang udah *nggak* sesuai lagi.

Kalo saya sebenarnya dengar-dengar *bully*-an itu apa batin saya *nggak* bisa, aduh bagaimana ini, kata-kata kasar itu muncul, dalam berlalu lintas, dalam dunia maya, *nah* ini *nggak* boleh kita biarkan terus berlalu.

Dan tugas menurut saya, ini tugas BPIP memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila walaupun tidak satu tafsir saya sependapat. Karena memang itulah apa ketika dulu zaman orde baru itu satu tafsir. Tapi saya kira *nggak* juga, kita ke belakang ini biarkan, tapi yang penting terjadi harmonisasi.

Saya kira itu saran saya, gunakan konten-konten kreatif, aktor-aktor, aktor kreatif tumbuh kembangkan, karena menurut hasil *survey* kita semua bahwa itu memberikan dampak terhadap isu-isu yang kita kemukakan.

Misalnya Tiktok. Tiktok itu sekarang sudah disukai oleh-oleh semua orang, bagaimana mengisi Pancasila dalam Tiktok itu, *nggak* perlu dengan Pancasila satu ini, *nggak-nggak* begitu, nilai-nilai.

Contoh, anak muda SMP, SD di NTT kalo tidak salah di Tiktok itu naik bendera ketika jatuh dia berkorban untuk menaikkan merah putih dan itu tranding, viral iya kan? Dan itu adalah kalo bahasa kita itu murni, natural.

Nah kalau kadang-kadang kalau dibikin-bikin kan kadang kita enggak murni. Tapi itu nilai yang tumbuh dan berkembang di kita, bahwa semangat perjuangan, semangat kepahlawanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai keadilan sosial.

Contoh bansos. Yang *nggak* berhak dapat bansos menuntut bansos, di kampung jadi kelahi. *Nah* ini, *nah* ini kan perlu dianu ini, kalau ini *nggak* boleh, jangan ininya masih perlu lagi. *Nah*, begitulah contoh-contoh yang barangkali nilai-nilai ini kita kemukakan.

Kita banyak melihat yang negatif tapi, *insyaallah* dengan proses ini *insyaallah* kita *positif thinking* saja kepada kita, karena ini milik kita, ini budaya kita.

Saya kira itu, metode ini penting sekali dan saya ingin melihat adakah sudah dalam program ini pembuatan itu, berapa konten yang dibikin? Dananya 12 miliar, pengkajian materi bentuknya apa?

Saya kira 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, itu lebih mudah daripada kita, mohon maaf ya 100 diundang omong saya habis uang sekian. Boleh juga tetep, itu tetap kita lakukan tapi juga ada metode lain. Jadi kita disebut dengan pendekatan semua pendekatan kita gunakan, saya kira itu.

Mohon maaf Pimpinan itu saja untuk BPIP.

Untuk yang lain saya kira setuju anggaran ini supaya mereka maksimalkan peran dan tugas mereka sebagai Menteri dan Kepala Sekretaris Negara.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak.

Ini tadi diketok jam 15.30, sekarang udah jam 16.11. Kita perpanjang sampai jam berapa ini Pak Yulian? Iya, berapa Pak?

Pakai hallo-hallo Pak biar kedengaran di sini, biar direkam Pak.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

16.30 WIB.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

16.30 setuju ya Pak? Setuju ya, perpanjang sampai 16.30, masih kurang kita perpanjang lagi Pak. Tadi malam kita sampai jam setengah 12 malam, dan bangun-bangun begini Pak.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan Sesmenseg.

SEKRETARIS KEMENTERIAAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.):

Terima kasih Pak Wakil Ketua.

Perkenalkan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan terima kasih juga atas masukan, arahan dari Bapak-Bapak sekalian.

Untuk Kementerian Sekretaris Negara tadi Pak Gaus, terima kasih Pak Gaus atas perhatiannya terhadap pelaksanaan anggaran di Kementerian Sekretaris Negara dengan masukan-masukkan Bapak.

Yang pertama tadi Bapak menyampaikan tentang target PNBK Pak ya di PPKGBK dan PPKK di Kemayoran yang mungkin dalam istilah kurang optimis begitu karena di 2022 ternyata capaiannya 110% dari yang targetkan lebih 10% begitu.

Nah, perlu kami sampaikan Bapak bahwa, ketika kami menyusun rencana capaian PNBK di 2023, kami masih belum berada di akhir, di akhir 2022 sehingga kami belum mendapatkan capaian akhir PNBK di 2022. Jadi kami hanya memproyeksikan dari perkiraan kami kenaikan sebesar 8,05% dari target di 2022, naik 8,6 dan *alhamdulillah* ternyata setelah PPKM dikendorkan ada relaksasi sehingga pendapatan di kedua *value* ini naik pesat Pak.

Alhamdulillah sehingga dapat melampaui target, lebih dari 10% dari target yang kita tetapkan.

Tapi kemudian di tahun 2024 kami menargetkan lebih optimis Pak di 470 miliar, mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan kerja keras dan kerja cerdas kita semua.

Kemudian terkait dengan hotel Sultan, ini mungkin apa Bapak-bapak sekalian sudah mendapatkan informasi dari media massa. Dan terakhir kami kemarin melakukan konferensi pers terkait dengan ini. Jadi *alhamdulillah* HGB sudah berakhir, HGB yang dimiliki oleh pengelola Hotel Sultan dan kita berusaha untuk mempertahankan dan mengembalikan aset kita ini Pak.

Jadi ini betul seperti Bapak sampaikan, Pak Gaus bahwa ini aset negara. Jadi di awal-awal tahun 60-an PT Indobelgo waktu itu memohon untuk, memohon izin kepada Gubernur DKI, Bang Ali Sadikin untuk membangun hotel dan fasilitas lain untuk kepentingan kegiatan-kegiatan olahraga di Gelora Bung Karno. Memohon izin Pak, memohon izin dan kemudian Pak Gubernur, Bang Ali Sadikin memberikan izin dan meminta untuk membayar *royalty* terhadap izin yang diberikan.

Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa, tanah-tanah di GBK itu semua adalah tanah-tanah masyarakat yang diprioritaskan oleh KUPAG namanya, Komando Urusan Pembebasan Asean Games di akhir tahun 50-an Pak sampai dengan awal tahun 60-an dibebaskan.

Kemudian itu tadi dari keluarga Pak Sutowo, Gus Sutowo meminta untuk membangun hotel kemudian diizinkan dengan membayar *royalty* dan kemudian mereka minta untuk mendapatkan HGB dan di tahun 73 HGB itu dikeluarkan, Pak. 2 HGB nomor 26 dan 27.

HGB tahun eh nomor 26 selesai di April 2023 ini, HGB 27 selesai di 3 Maret 2023, dua-duanya selesai. Dan kita tahu juga ada mitigasi, ada proses pengadilan Pak, mulai dari akhir-akhir orde baru sampai dengan melewati semua pemerintah Pak. Jadi ini bukan *concern* di pemerintahan Pak Jokowi saja tapi zaman dulu sudah berproses ini, Pak.

Di 2006 ada PK1, jadi kita kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi tapi kemudian kita menang di PK1, Pak. PK1 memutuskan bahwa HGB kita HPL kemudian surat negara adalah sah dan mereka diminta bayar *royalty*. Dan dibayar *royalty* 2006-2007. Tapi kemudian sampai dengan sekarang Indobelgo itu sebagai pengelola tidak membayar *royalty* Pak, 2007 sampai dengan 2023.

Dan kami sampaikan juga ke Pak Gaus tadi, tidak berhenti di situ Pak, tapi kami meminta kepada BPKP untuk melakukan appraisal Pak, berapa yang harus mereka bayar. Dan kami juga akan minta kepada Kementerian Keuangan, BPKP dan juga appraisal mandiri juga Pak, KPJJ untuk melakukan

riset, berapa aset yang ada di atas 2 HGB ini Pak. Dan selanjutnya kami akan mengambil sikap terhadap aset-aset yang ada di atasnya.

Dan untuk tindak lanjut dalam waktu dekat Pak karena ini akan ada banyak peringatan internasional dan juga ada FIFA 2023, kemudian ada KTT Asean yang akan dilaksanakan di JCC kami akan menyiapkan, melakukan revitalisasi di lingkungan kawasan GBK dan juga termasuk di HGB 26 dan 27 tersebut untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan negara dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan KTT.

Demikian Pak yang sudah kami kerjakan, jadi PK ini sudah PK4 Pak, PK ini sudah PK4. Jadi PK1 kita menangkan, PK2 mereka kembali Pak, PK3 mereka dan kita menangkan lagi, PK4 kita menangkan. Semua PK kita menangkan dan terakhir berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu mereka mengajukan PTUN, Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Pak Tomo, itu PK-nya bisa berapa kali Pak?

SEKRETARIS KEMENTERAIAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.):

Empat (4) kali, Pak.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Perkara apa ini?

SEKRETARIS KEMENTERAIAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.):

Ini rekor ini, Pak, ini ada rekor PK sampai 4 Pak dan kita menang terus, Pak. Menang terus, Pak.

Dan sekarang kita sedang digugat di PTUN, Pak. Yang digugat adalah Kementerian Agraria, BPN yang mengeluarkan HGB eh HPL kita HPL nomor 1 atas nama Kementerian Negara di tahun 89, harusnya sudah kadaluwarsa tapi itu sudah terlanjur sudah naik ke persidangan, Pak.

Dan kita dalam hal ini Kementerian Negara dan PPK GBK mengajukan sebagai penggugat intervensi Pak dan sudah diterima oleh pengadilan. Karena kita yang tahu persis selama ini kita gugat berkali-kali diperdata Pak dan menang dan kita mengajukan sebagai pihak dalam perkara PTUN ini, Pak.

Mohon dukungan dari Bapak, Ibu sekalian untuk penyelamatan aset kita ini Pak dan pengembalian aset yang luar biasa ini Pak. Dan hampir ada 14 hektar di sana Pak dan kita akan kembalikan untuk kepentingan negara.

Kemudian terkait dengan anggaran 2024, Bapak. Jadi memang sebetulnya masih ada kenaikan anggaran Pak 1, sebentar 1,55% Pak dari pagu alokasi awal Bapak sebetulnya dari 2023 pagu alokasi, maaf iya pagu alokasi awal 2 triliun 269 miliar, di pagu indikatif 2024 2 triliun 650 miliar lebih. Jadi naik satu koma, 1,55 miliar *eh* maaf naik 1,55%, tapi memang dibanding dengan pagu alokasi 2023 setelah penyesuaian 3 triliun 204 ini memang turun 17,30%.

Perlu kami sampaikan kenapa 2023 banyak penambahan anggaran karena di 2023 ada penambahan Pak senilai 1 triliun 693, ini untuk kepentingan kegiatan-kegiatan internasional kader KTT. Kemudian kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian kami juga menganggarkan untuk satuan tugas Undang-Undang Cipta Kerja dan ini yang dititipkan ke Kementerian Negara dan tim transisi pendukung kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan IKN, Pak.

Sebelum IKN dapat beroperasi, di tahun 2023 dan mempunyai anggaran sendiri, anggarannya dititipkan ke kami sehingga ada penambahan anggaran yang cukup besar, Pak. Jadi penurunan memang kalau dari pagu alokasi 2023 *stagnation* ada perubahan 17,35%, demikian Bapak,

Kemudian satu hal lagi terkait dengan serapan anggaran 2023 yang masih 25%, memang ada beberapa kegiatan yang belum sesuai pertanggungjawabannya Pak sehingga masih diangka 25%. Mungkin berapa minggu lagi setelah kami menyelesaikan bakal ada kenaikan yang signifikan terkait dengan serapan anggaran 2023, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Cukup ya Pak ya Pak Tomo ya?

SEKRETARIS KEMENTERAIAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.):

Cukup.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Silakan KSP.

DEPUTI PERWAKILAN KEPALA STAF PRESIDEN (JALESWARI PRAMODHAWARDANI):

Terima kasih Bapak atas semua masukannya baik dari Pimpinan, wakil Pimpinan, maupun seluruh Anggota Komisi II.

Saya rasa tadi Bapak Junimart memberikan atensi yang sangat bagus untuk masalah pertanahan secara umum dan spesifik untuk kasus Bahjambi, ini akan menjadi evaluasi bagi kami di internal KSP, tetapi sedikit Bapak.

Secara umum sebetulnya KSP juga selalu berkoordinasi dengan dalam konteks ini, dalam konteks tanah secara umum dengan kanwil BPN di provinsi dan kabupaten. Tetapi memang ada kasus-kasus mungkin yang tadi salah satunya disebutkan Bapak yang perlu mendapatkan evaluasi mendalam dari kami, ini akan menjadi atensi dan perhatian kami di dalam.

Kemudian Bapak yang kedua, kami juga sedang mempersiapkan pertemuan tentang sinkronisasi 10.419 kasus data pengaduan masyarakat. Dan kami berkoordinasi dengan kawan-kawan KLHK dan ATR BPN.

Selain itu, kami juga sebetulnya sudah membentuk Satgas penyelesaian konflik agrarian dengan Kementerian ATR BPN dan KLHK. Dan sekali lagi terima kasih untuk masukannya dan atensinya terhadap kasus tanah ini. Ini betul-betul akan menjadi perhatian dan evaluasi kami ke dalam. Dan kami setuju 100% Bapak bahwa sebagai pelayanan publik kita memang tidak boleh arogan.

Dan yang kedua, kepada Bapak Yanuar. Betul Bapak, tanggal 15 Mei 2023 memang ada Ratas yang bicara tentang satgas percepatan investasi di IKN. Jadi selain pengelolaan tanah di IKN yang tadi Bapak perhatian tentang persoalan-persoalan itu tentu tidak mudah. Ini untuk mengakselerasi atau percepatan terhadap penyelesaian ini memang Presiden membentuk Satgas ini yang salah satunya adalah ini terkait dengan investasi.

Jadi status lahan yang *clear* dan *clean* menjadi investasi. Ini masih baru sekali sehingga nanti proses dan progresnya kalau Bapak berkenan kami juga akan menyampaikan dalam rapat-rapat kita selanjutnya.

Dan kepada Bapak Gaus, terima kasih untuk apresiasi dan dorongannya agar kami selalu memperhatikan serapan anggaran Bapak. Saya tidak tahu apakah serapan anggaran yang 99,42% itu memang bukan sesuatu yang apa namanya? Apa tinggi karena memang alokasi anggaran kami rendah, tetapi intinya bukan persoalan rendah atau tingginya anggaran, tapi kami mencoba mengoptimalkan pagu anggaran yang ada, tersedia, sekali lagi terima kasih.

Dan terakhir, kami juga akan menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya kawan-kawan di Komisi II DPR RI atas masukan-masukan dan dorongan untuk agar KSP kinerjanya selalu diperbaiki dari waktu ke waktu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya, terima kasih Ibu Jaleswari ya. Makasih sudah menjawab secara sumir ya, saya tidak akan *menimbali*.

Salah satu kasus Bajambi itu sudah lama itu dan KSP sudah turun sejak tahun 2022 eh 2021 ya.

Nah, di dalam rencana kerja masih 2024 masih masuk Bu, begitu loh. Mengajukan pengelolaan aduan baik melalui audiensi dan tindak lanjut terhadap lokasi prioritas, iya kan, yang berdampak pada banyak pihak, simalingkar, PTPN 2, tanjung muara, PT Lestari, PTPN 3 dan PTPN 4, Bajambi itu 4 Bu. Kok masih masuk rencana kinerja lagi Bu 2024?

Maksudnya *opo iki*, apa maksudnya? Mau memelihara ini? Itu maksud saya, selesaikan cepat, kalo KSP turun itu selesai Bu, itu maksud saya Bu Jeleswari. Bukan menjadi salah satu program kinerja 2024, iya kan?

Jadi kalau sudah begini polanya, anatominya itu menurut saya ya mohon maaf ini memelihara sengketa. Kenapa? Masih masuk dalam ranking 2024, ini baru bulan berapa sekarang, bulan 5. Masa *nggak* ada pemikiran sampai bulan 7, bulan 9 tahun 2023 misalnya, masih masuk di sini. Silakan baca itu ya, masih masuk di rencana kinerja ke deputian 2 tahun 2024, maksudnya apa kalo begini, begitu loh.

Jadi apa yang sudah selesai. Di sini disebut, capaian sepanjang 2022 KSP berhasil mengawal penyelesaian konflik di 57 kasus lokasi, 3 kasus ditangani dengan tuntas, 6 kasus menurunkan kasus konflik di lapangan, iya kan. 3 kasus di ya 3 kasus ditangani hingga tuntas. 6 kasus menurunkan eskalasi politik di lapangan. Sementara di atas disebutkan berhasil mengawal penyelesaian konflik di 57 kasus.

Nah, kalau 3 ditambah 6 ya 9 ya kan, 57 dikurang 9 berapa? *Nah* terus ke mana itu kasus itu maksud saya Bu, tolong dikoreksi lah.

Jadi jangan bicara iya kan, rencana kinerja 2024 masih sengketa atau konflik yang 2022 begitu loh. Apa gunanya kita turun Bu KSP ini ya kan begitu?

Asal tahu saja, saya sudah minta kepada Menteri ATR supaya tidak memperpanjang HGU PTPN 4 di Bajambi ya. Tapi saya dikasih solusi. Silakan perpanjang, tapi tidak mengukur tanah yang menjadi sengketa, mesti begitu solusinya begitu loh. Silakan diukur perpanjang tapi jangan ukur tanah sengketaanya begitu loh. Itu kan solusi ya kan, mestinya KSP begitu kerja-kerjanya.

Jadi jangan bicara 2022 capaian kinerja ini 2022, tapi masih muncul di 2024, coba dikoreksi begitu loh. Supaya rakyat itu apa namanya betul-betul puas dengan program kerja Pak Jokowi, kita juga mau Pak Jokowi loh Bu.

Saya kampanye habis-habisan Bu, ya biar tahu saja, begitu. Ini tidak semua di sini kampanye untuk Presiden kemarin, biar tahu Bu, begitu loh. Ibu kan hanya menikmati kemenangan sebagian kita ini tapi tidak pernah ikut berjuang, begitu Bu Jeleswari.

Saya tidak-tidak ini, bukan tidak suka kepada KSP. Kita mengkritisi supaya kerja ke depan itu betul-betul bermanfaat kepada masyarakat langsung begitu loh. Ini mereka nonton ini. Saya rasa masuk web, kok Bapak terlalu kencang begitu bicara? Memang salah. Betul Pak, nanti dari luar banyak baca ini Bu, begitu loh ya.

Silakan BPIP.

DEPUTI PERWAKILAN KEPALA STAF PRESIDEN (JALESWARI PRAMODHAWARDANI):

Baik Bapak, terima kasih.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.I.P.):

Iya.

Silakan Prof. Yudian.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

Yang pertama terima kasih kepada Pak Guspari ya.

Ini kami siap untuk memasukkan lagi sosialisasi dan juga terima kasih atas dukungan kenaikan anggarannya.

Kemudian untuk Pak Yanuar Prihatin, nanti kami akan kirim naskah-naskah yang sudah jadi ya untuk semua Komisi II ya. Dan juga kemarin kami baru aja meresmikan Expo Digital Pancasila, baru saja kemarin tanggal 28 ya 28, pada saat kirab Pancasila di Jalan Sudirman sampai Bundaran HI dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni.

Kemudian kami juga sudah menyiapkan itu, standar kompetensi sudah ada, jadi nanti kami kirim. Juga ada 15 buku yang dulu pernah kami laporkan dan *insyaallah* besok tanggal 1 Juni akan diluncurkan oleh Presiden di dalam peringatan hari lahir Pancasila di Monas ya bukunya.

Buku ini ada 15 buah dari untuk dari PAU atau PAUD, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Tapi perguruan tingginya baru S1 dan kami akan meneruskan untuk S2 dan S3.

Nah, kami tentu sangat bahagia dan sangat setuju kalau BPIP bisa dinaikkan setingkat lembaga negara ya. Ini memang sudah lama menjadi harapan kami, tapi untuk hari-hari ini kami masih mendengarkan arahan dari Bu Ketua dewan pengarah dulu di situasi mohon maaf lah sulit, tapi kami sangat setuju dan berharap nanti mendapat dukungan ya.

Kemudian Bapak Syamsurizal, ini juga terima kasih sekali ya apalagi kenaikannya ini boleh 10 kali lipat dari yang kami usulkan begitu. Terima kasih, nanti kami akan tindaklanjuti ya.

Tentu saja ini langsung terkait dengan saran Bapak Heru ya, yang kami harus membuat program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang dikaitkan dengan BPIP buat *role* ke sana. Sehingga nanti *nuwun sewu* kenaikan 10 kali lipat itu bisa dilihat wajar kalau kata Pak Heru, terima kasih Pak, *njih*. Nah, dengan kata lain kami akan buat yang ideal itu.

Kemudian yang terakhir, seingat saya dari Bapak Drs.Difriadi ya, ini kalau saya tidak salah beliau ini orang Banjar nih kalo saya denger lisannya itu lidahnya itu ya. Jujur kalo, saya lahirnya kan di Balikpapan Pak jadi ada satu dua bisa lah bahasa Banjar ya.

Terima kasih sekali. Jadi ini kami sudah punya Pak, nanti bisa nanti juga itu ada konten kreatif kami satu misalnya mimbar sofan, ada film, ada musik, olahraga, kuliner dan Tik Tok, juga ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter. Dan juga kami dulu pernah punya program "Lorong Pancasila si AA", jadi pada prinsipnya kami sudah kuat ya sudah ya. Dan juga di kereta api sudah ada itu sosialisasi Pancasila ya jadi.

Nah, yang terakhir tentu sekali lagi soal anggaran ini ya karena agak dimaksimalkan, ya jadi kami sangat terima kasih dan demikian terima kasih dikembalikan kepada Pak Ketua, Pak Girsang.
Salam Pancasila!

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Terima kasih, Prof Yudian.

Ini ada penambahan Rp28.754.992.000,00 untuk fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka ya Pak ya dan purna paskibraka duta, ini menarik ini Pak mesti dilestarikan ini.

Baik,

Bapak/Ibu sekalian,

Kita masuk kepada acara kesimpulan, yang pertama, ini layarnya sudah panas ini mulai tadi malam, kita sudah ngantuk-ngantuk ini Pak tapi demi rakyat juga kita.

1. Komisi II DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekertaris Negara, Sekertaris Kabinet, Kantor Presiden dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai berikut:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara dan KSP:
 - i. Realisasi APBN tahun 2022 sebesar Rp3.419.288.110.136,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.631.390.980.000,00 atau sebesar 94,16% yang termasuk di dalamnya realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Staf Presiden sebesar Rp105.173.742.771,00 dari

- pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp105.784.896.000,00 atau sebesar 99,42%.
- ii. Realisasi APBN tahun 2023 per-20 Mei 2023 sebesar Rp809.929.536.337,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp3.204.436.183.000,00 atau sebesar 25,28% termasuk di dalamnya realisasi anggaran tahun 2023 kantor staf presiden sebesar Rp38.460.228.372,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp121.778.584.000,00 atau sebesar 31,58%.
 - iii. Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp2.650.162.589.000,00 termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden atau KSP sebesar Rp122.033.004.000,00.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

- b. Sekretariat Kabinet.
 - i. Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp295.639.314.880,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp305.755.794.000,00 atau sebesar 96,69%.
 - ii. Realisasi APBN tahun 2023 per-22 Mei 2023 sebesar Rp152.626.093.953,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp334.692.364.000,00 atau sebesar 45,60%.
 - iii. Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp348.769.306.000,00.
 - iv. Usulan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp16.785.887.000,00
 - c. BPIP.
 - i. Realisasi APBN tahun 2022 sebesar Rp308.446.284.679,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp321.690.623.000,00 atau sebesar 95,88%.
 - ii. Realisasi APBN 2023 per 6 Mei 2023 sebesar Rp126.457.752.487,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp328.896.748.000,00 atau sebesar 38,45%.
 - iii. Pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp341.127.197.000,00.
 - iv. Usulan tambahan anggaran untuk kekurangan kebutuhan anggaran tahun 2024 sebesar Rp149.181.317.000,00.
2. Terhadap pagu indikatif RAPBN tahun 2024 yang diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, KSP, dan BPIP dan usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diusulkan oleh

Sekretariat Kabinet dan BPIP, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.

3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, KSP dan BPIP untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2023 dan rinciannya sesuai dengan program dan kegiatan beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI, paling lambat hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2024 yang akan datang.

Cocok ya, setuju ya?

Silakan Pak. Pakai halo-hallo Pak pakai halo-hallo.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

Pak Ketua, halo.

Soal *dateline* saja, begini mohon maaf, karena BPIP ini mulai besok sampai tanggal 4 itu sangat padat. Jadi kalau bisa *dateline* jangan 5 Juni, jadi ditambah dua, tiga hari begitu.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Karena minggu depan kita sudah pembahasan, Pak.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

Oh begitu? Oh ya sudah.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Ya tidak apa-apa Pak, dia kerja malam-malam kayak kami kan sampai malam Pak, boleh lah.

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

Iya.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Jadi liburnya Bapak itu jangan dipakai libur dulu, urusan salam Pancasila dulu Pak. Saya nomor 5, Pak. Jadi salam Pancasila, saya begitu Pak.

Setuju ya?

KEPALA BPIP (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.):

Setuju-setuju.

KETUA RAPAT/F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan berakhirnya rapat kita pada hari ini, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Sekretaris Kabinet, KSP dan BPIP. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini akan membawa manfaat yang lebih luar biasa lagi dalam pembahasan pendalaman minggu depan.

Salam sehat kepada kita semua,

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.42 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. hpi.

**Mahmud, S.E.
NIP.196508021988031002**